



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 07/DP3APPKB/I/2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG.

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 8 Januari 2021



NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 7/DP3APPKB/1/2021
 TANGGAL : 8 JANUARI 2021
 TENTANG : PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1.	SURAHMY NURDIN, S.Pt NIP. 19790908 200801 2 018	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD c. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
2.	ALIMAH, S.STP NIP. 19840224 200412 2 001	Kasubag Keuangan	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
3.	Hj. HARTATI, S.Sos, MM NIP. 19691231 199610 2 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah a. Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD 4. Administrasi kepegawaian perangkat Daerah a. Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian b. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian c. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5. Administrasi Umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan rumah tangga c. Penyediaan bahan logistik kantor d. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan bahan/material f. Fasilitas kunjungan tamu g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
4.	ANDI DIARIFAH, SS NIP. 19670515 200003 2 007	Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga	II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
5.	HARTATI, S.Sos NIP. 19651231 198809 2 011	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	2. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	
6.	ANDI NUR ASNI, S.Sos, MM NIP. 19801105 200212 2 004	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota a. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
7.	ANDI DIARIFAH, SS NIP. 19670515 200003 2 007	Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak tingkat daerah kabupaten/kota a. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten/kota a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
8.	Dra. Hj. HAMIAH NIP. 19641231 199003 2 062	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA) 1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota a. Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota a. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	
9.	NURNAENI HASENG, S.Sos NIP. 19661231 198502 2 001	Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota a. Advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
10.	A. MUTHIAH RAHIMAH A., SE NIP. 19791014 200801 2 015	Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk a. Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal b. Pelaksanaan Sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga	
11.	AMIRUDDIN C. NIP. 19630604 198912 1 001	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan		
12.	A. MUTHIAH RAHIMAH A., SE NIP. 19791014 200801 2 015	Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan	c. Pelaksanaan Rapat pengendalian program KKBPK	
13.	AMIRUDDIN C. NIP. 19630604 198912 1 001	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota a. Penyediaan data dan informasi keluarga	
14.	A. MUTHIAH RAHIMAH A., SE NIP. 19791014 200801 2 015	Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal a. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang b. Penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
15.	SUMARSIAH, SE, MM NIP. 19741225 200901 2 002	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	c. Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	
16.	MARHIMA, SE, M.Si NIP. 19760307 200212 2 005	Kepala Seksi Pembinaan dan Kesertaan ber-KB	d. Pengendalian Program KKBPK	
15.	SUMARSIAH, SE, MM NIP. 19741225 200901 2 002	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	2. Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	
16.	MARHIMA, SE, M.Si NIP. 19760307 200212 2 005	Kepala Seksi Pembinaan dan Kesertaan ber-KB	b. Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB c. Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	
17.	SUMARSIAH, SE, MM NIP. 19741225 200901 2 002	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota a. Pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	
18.	ANDI UMIATI NIP. 19691217 199103 2 003	Kepala Seksi Jaminan ber-KB	b. Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	
19.	MARHIMA, SE, M.Si NIP. 19760307 200212 2 005	Kepala Seksi Pembinaan dan Kesertaan ber-KB	c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	
20.	ANDI UMIATI NIP. 19691217 199103 2 003	Kepala Seksi Jaminan ber-KB	d. Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	
21.	MARHIMA, SE, M.Si NIP. 19760307 200212 2 005	Kepala Seksi Pembinaan dan Kesertaan ber-KB	4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kertaan ber-KB a. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	

